

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu yang paling krusial. Pencemaran lingkungan sering pula dikaitkan dengan keberadaan industri, hal ini tidak lepas ke lingkungan yang melalui proses pengolahan lebih lanjut sehingga bahan-bahan tersebut dapat diurai oleh mikro organisme di lingkungan pembuangannya. Mengingat kegiatan dari industri yang begitu padatnya menimbulkan masalah dampak lingkungan akibat penanganan limbah yang tidak benar akan mengganggu kesehatan. Sehingga masyarakat dapat terkena dampak dan menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak di ketahui oleh masyarakat, hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana penanganan penegak hukum terhadap kasus-kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri-industri di Indonesia. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka untuk mencari data yang dipergunakan di titikberatkan kepada data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pejabat lingkungan hidup harus rutin dalam melakukan pengawasan diantaranya yaitu melakukan pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala waktu tertentu, misalnya dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan, dan melakukan pengawasan mendadak yang dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun dalam implementasinya pemerintah kurang tegas dalam menegakkan hukum lingkungan, hal ini mengakibatkan pencemaran lingkungan masih terjadi di Indonesia. Tercemarnya lingkungan tentu dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu, masyarakat haruslah senantiasa menjaga lingkungan agar tidak tercemar dan tetap lestari.

ABSTRACT

Environmental pollution is one of the factors that influence the quality of the creatures around it so that the problem of environmental pollution is one of the most crucial. Environmental pollution is also often associated with the existence of the industries, this is not separated into the environment through further processing so that these materials can be decomposed by micro-organisms in the environment of disposal. Considering that activities from industries that are so dense cause problems of environmental impacts due to improper handling of waste that will disrupt health. So that people can be affected and cause various kinds of diseases that are not known by the community, this is an illegal act. In connection with this matter, this research is intended to find out how the government has done efforts to provide sanctions to the perpetrators of environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the efforts that can be done by the community in preventing and overcoming pollution. environment according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

This research was conducted using descriptive analysis method, meaning that this study was intended to describe how law enforcement handled cases of environmental pollution caused by industries in Indonesia. While the approach is carried out using the normative juridical approach, then to find the data used in the point of emphasis on secondary data, namely through literature studies.

Based on the results of the study, the author argues that environmental officials must routinely carry out supervision, including routine monitoring carried out at regular intervals, for example, carried out once a month at the end of the month, and carrying out sudden supervision on activities and / or businesses is in trouble. Criminal sanctions given to the perpetrators of environmental pollution have been regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, but in its implementation the government is less strict in enforcing environmental law, this has resulted in environmental pollution still occurring in Indonesia. Environmental pollution can certainly affect the survival of humans and other living things. For this reason, the community must always protect the environment so that it is not polluted and remains sustainable.